

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan atau kemajuan dengan melakukan berbagai upaya kearah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah mencakup seluruh sistem yang ada dalam suatu wilayah atau negara seperti sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meningkatkan kinerja perekonomian dapat menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk melihat keberhasilan perekonomian negara. Perekonomian mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi saat ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kegiatan perekonomian yang dimaksud dalam pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan produksi barang dan jasa disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.²

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat meningkatkan kesejahteraan. Tinggi rendahnya suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³ Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digunakan untuk menganalisis kinerja (performance) perekonomian suatu negara dibandingkan dengan perekonomian negara lainnya. Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan

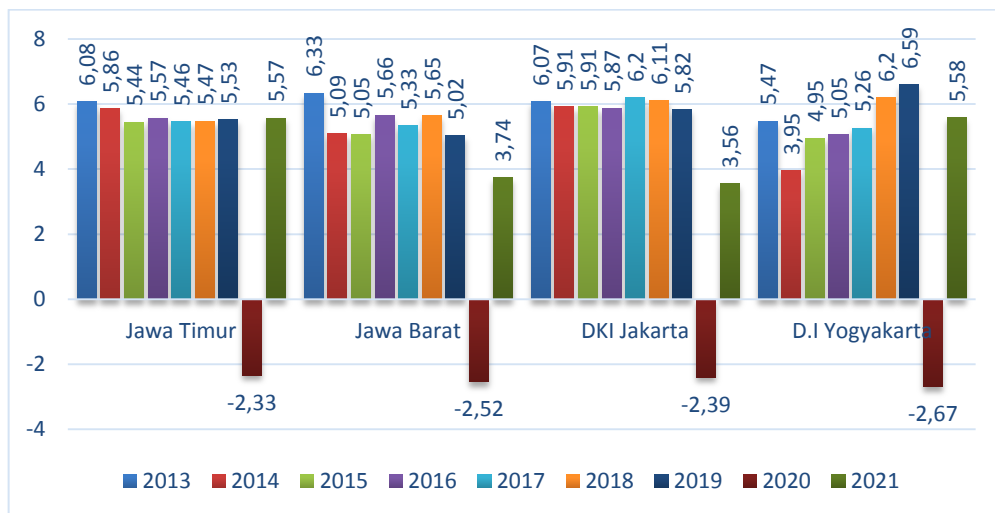
² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 423.

³ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hal. 67.

ekonomi yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah mencerminkan keterbatasan kemampuan perekonomian suatu negara dalam menghasilkan output dalam perekonomian.⁴

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Dalam analisa makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan riil nasional yang dicapai oleh suatu negara atau daerah. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) bagi wilayah negara dan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa Tahun 2013-2021:

Grafik 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa
Tahun 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

⁴ Christea Frisdiantara, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), hal. 5.

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa yaitu pada Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78%. Provinsi Jawa Timur sebesar 4,73%, D.I Yogyakarta sebesar 4,48%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 4,37%.

Suatu perekonomian dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Oleh karena itu, naik turunnya pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah salah satu faktor masalah yang utama dalam perekonomian. Akibat dari inflasi adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian disuatu negara dimana terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang yang disebabkan oleh tidak seimbangnya arus barang dan uang.

Inflasi adalah gejala kenaikan yang berkelanjutan pada tingkat harga umum. Kenaikan harga hanya satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas atau menyebabkan barang lain juga naik harganya. Tingkat inflasi biasanya digunakan untuk menunjukkan sampai dimana buruknya permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Dalam perekonomian yang sedang tumbuh, inflasi yang rendah tingkatnya biasa dinamakan inflasi merayap yaitu sekitar 2 hingga 4 %. Namun tingkat inflasi yang mencapai 10% atau lebih akan menjadi suatu permasalahan yang serius.⁵ Tidak semua inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap perekonomian, tetapi tergantung parah atau tidaknya inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan, sebenarnya bisa memberikan pengaruh yang positif artinya dapat mendorong perekonomian yang lebih baik dengan meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, pada masa inflasi yang parah, yaitu ketika inflasi tidak terkendali (hiperinflasi),

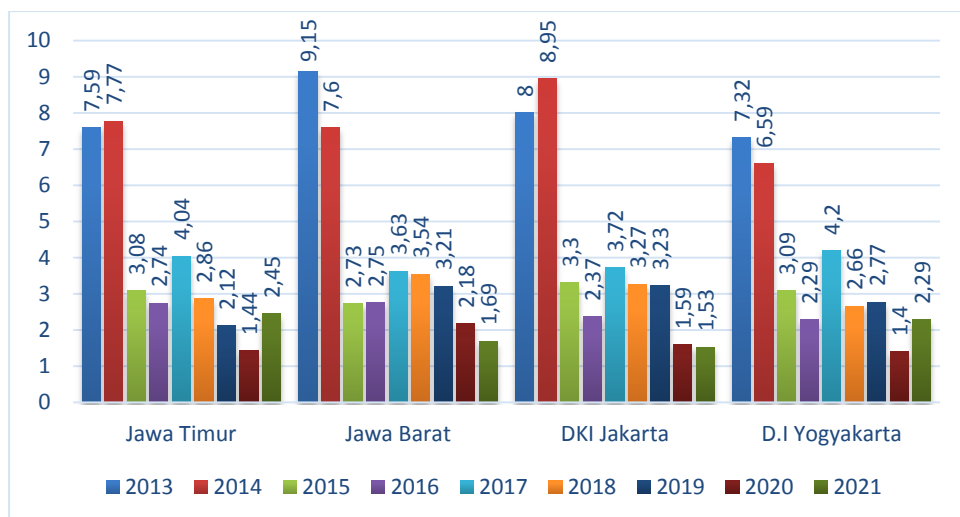
⁵ Shibghatullah Mujsddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal. 51.

keadaan ekonomi menjadi tidak teratur maka akan memberikan kesan perekonomian yang buruk. Orang-orang takut bekerja, menabung atau berinvestasi dan memproduksi karena kenaikan harga yang cepat.⁶

Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi pada suatu tingkat yang rendah dan stabil. Dalam upaya pengendalian laju inflasi, diperlukan koordinasi antara kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.⁷ Berikut ini ini merupakan data inflasi tahunan pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa tahun 2013-2021:

Grafik 1.2

Inflasi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa Tahun 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik diatas, inflasi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Inflasi tertinggi yaitu pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 9,15% dan terendah tahun 2021 sebesar 1,69%. Provinsi DKI Jakarta tertinggi tahun 2014 sebesar 8,95% terendah tahun 2021 sebesar 1,53%. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 7,77% dan tahun

⁶ Armayanti and Cut Zakia Rizki, “Pengaruh Sektor Riil Dan Sektor Keuangan Terhadap Inflasi Di Indonesia,” *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* 2, no. 1 (2017), hal. 76.

⁷ Siska Yuli Anita, *Manajemen Keuangan Lanjutan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hal. 42.

2020 sebesar 1,44%. Terakhir Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013 sebesar 7,32% dan terendah tahun 2020 sebesar 1,4%

Selanjutnya, faktor perekonomian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu penyaluran dana ZIS. Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk itu setiap individu diwajibkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang sudah dituangkan dalam al quran dan hadist. Dana ZIS yang didapatkan harus disalurkan kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu disalurkan kepada golongan fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Dengan demikian dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran sebagian besar masyarakat yang di bawah garis kemakmuran.⁸ Penyaluran dana ZIS ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan harta yang selalu produktif ini maka akan meningkatkan output penyerapatan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.

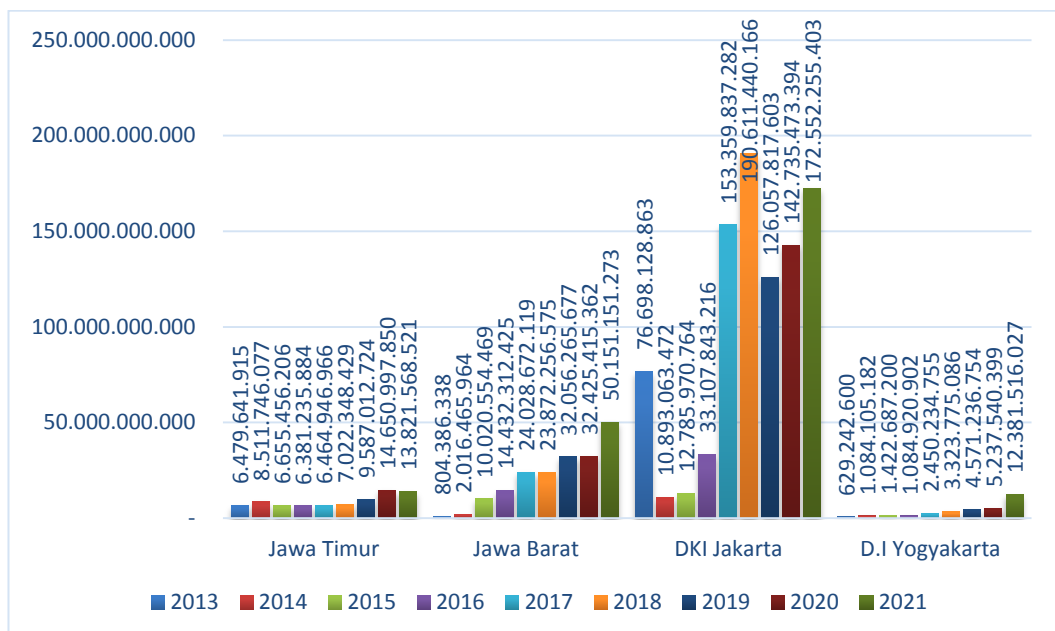
Mekanisme pembayaran zakat diatur dalam Al-Qur'an, sedangkan pengelolaan dana zakat tergantung pada kebijakan pemerintah suatu negara. Di Indonesia, terdapat lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh menteri agama dan bertanggung jawab kepada presiden, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.1. Nomor 8 Tahun 2001. Dimana BAZNAS memiliki fungsi untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Penyaluran ini dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

⁸ Sarah Hasanah Qoyyim and Sisca Debyola Widuhung, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1.2 (2020), hal. 55.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Islam menganjurkan untuk menyalurkan dana ZIS yang bersifat jangka panjang, maka dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) tersebut tidak hanya dikonsumsi saja tetapi digunakan untuk memperdayakan ekonomi para penerima sehingga pendapatannya akan meningkat di masa depan dan diharapkan statusnya berubah menjadi muzakki (pembayar zakat). Berikut ini adalah data penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa tahun 2013-2021:

Grafik 1.3

Penyaluran Dana ZIS pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik diatas, jumlah penyaluran dana ZIS pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa Tahun 2013-2021 mengalami peningkatan. Namun terdapat penurunan juga meskipun penurunan yang terjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Jumlah penyaluran dana ZIS tertinggi di Pulau Jawa yaitu pada Provinsi DKI Jakarta, dimana pada tahun 2013 penyaluran dana ZIS sebesar Rp. 76.698.128.863 mengalami naik turun setiap tahunnya hingga tahun 2021 mencapai Rp. 172.552.255.403. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar Rp. 804.386.338

mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 50.151.151.273. Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp. 6.479.641.915 hingga tahun 2021 menjadi Rp. 13.821.568.521. Sedangkan Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2013 penyaluran dana ZIS sebesar Rp. 629.242.600 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai Rp. 12.381.516.027.

Selain itu, faktor perekonomian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Secara umum pengangguran adalah seseorang yang telah tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Pengangguran bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab salah satunya adalah jumlah penduduk, jika di suatu daerah terdapat penambahan jumlah penduduk, maka akan terjadi penambahan jumlah angkatan kerja yang tersedia sehingga pertumbuhan angkatan kerja juga diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.⁹ Hal tersebut berhubungan dengan laju pertumbuhan ekonomi, karena laju pertumbuhan menunjukkan keadaan perekonomian pada suatu daerah. Semakin tinggi perekonomian pada suatu daerah maka akan mendorong kondisi perusahaan yang berlangsung sehingga aktivitasnya semakin meningkat dan kesempatan kerja juga akan meningkat.

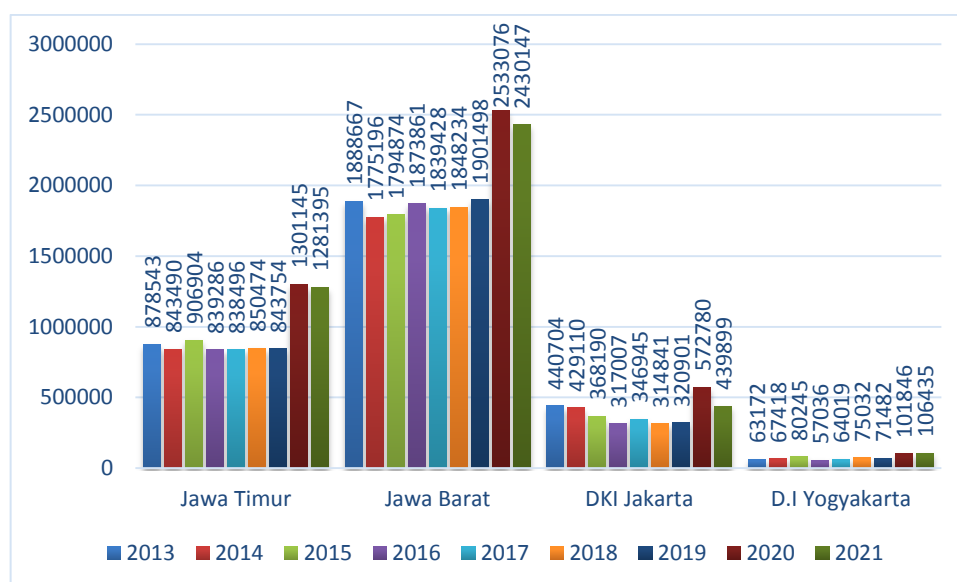
Pengangguran merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Besar atau kecilnya tingkat pengangguran di suatu negara akan berdampak pada kemakmuran masyarakat, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Melalui tingkat pengangguran ini dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat tetapi tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan

⁹ Etik dan Yolanda Sari Winami, *Ekonomi Makro I*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hal. 16.

mengganggu stabilitas nasional setiap negara.¹⁰ Sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Untuk itu dalam mengurangi pengangguran yang terjadi maka pemerintah harus meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja, memberikan pelatihan keterampilan keahlian pada tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan membangun industri baru terutama yang bersifat padat karya serta meningkatkan mutu pendidikan. Berikut data pengangguran pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa pada tahun 2013-2021:

Grafik 1.4

Pengangguran pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa Tahun 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam waktu 9 tahun mulai dari tahun 2013-2021 jumlah pengangguran pada Provinsi di Pulau Jawa cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah pengangguran tertinggi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2013 sebesar 1.888.667 jiwa, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 2.430.147 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran paling rendah yaitu pada Provinsi D.I Yogyakarta pada

¹⁰ Lindah Tri Amanat Sari and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Pengaruh Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021), hal. 181.

tahun 2013 jumlah pengangguran sebesar 63.172 jiwa dan pada tahun 2021 menjadi 10.6435 jiwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tingkat inflasi, ZIS dan pengangguran memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena inflasi, ZIS dan pengangguran adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keadaan suatu negara, terutama untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melihat permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan beberapa variabel melalui pengangguran sebagai variabel intervening dengan judul, **“Pengaruh Inflasi dan Penyaluran Dana ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Terpilih Di Pulau Jawa”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2013-2021 pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa mengalami fluktuatif.
2. Inflasi yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa yaitu tahun 2013-2021 mengalami fluktuatif. Hal ini biasanya disebabkan oleh jumlah uang yang beredar dan tidakseimbangannya permintaan dan penawaran barang dan jasa yang tersedia.
3. Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa pada tahun 2013-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penyaluran dana ZIS tersebut maka dapat mengatasi kemiskinan dan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
4. Pengangguran selama tahun 2013-2021 pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan belum tersedia secara penuh dan tenaga kerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sebagai variabel intervening pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa?
5. Bagaimana pengaruh penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sebagai variabel intervening pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa
2. Untuk menguji pengaruh penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa.
3. Untuk menguji pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Terpilih di Pulau Jawa.
4. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sebagai variabel intervening Provinsi Terpilih di Pulau Jawa.
5. Untuk menguji pengaruh penyaluran dan Zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sebagai variabel intervening Provinsi Terpilih di Pulau Jawa.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan sehingga penelitian ini memiliki manfaat yang optimal baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, menambah informasi dan pengetahuan tentang ilmu ekonomi khususnya ekonomi makro dan ekonomi pembangunan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan dan tolak ukur pemerintah dalam memberikan kebijakan untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi dalam pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Pelaku Ekonomi

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pelaku ekonomi sehingga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih baik dan bermanfaat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber referensi untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan yang digunakan untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian agar tidak melebar ke mana-mana dari topik permasalahan. Maka, dalam penelitian ini difokuskan pada pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa yang dibatasi menggunakan variabel independen diantaranya inflasi dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta variabel intervening yaitu pengangguran.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tetapi juga terbatasnya informasi dari pihak terkait seperti website resmi BPS, BAZNAZ. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan periode yaitu selama kurun waktu 2013 hingga 2021.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.¹¹
- b. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan yang terjadi secara serentak dan terus berlanjut dari waktu ke waktu.¹²
- c. ZIS (zakat, infaq, shodaqoh). Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹³ Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.¹⁴ Sedangkan shadaqah adalah segala pemberian yang berupa harta maupun suatu kebajikan untuk mengharap pahala dari Allah SWT.¹⁵
- d. Pengangguran adalah seseorang yang sudah tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi masih dalam tahap mencari pekerjaan.¹⁶

¹¹ Patta Rapanna, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal.7.

¹² Feliks Arfid Guampe, *Ekonomi Makro*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hal. 70.

¹³ Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2022), hal. 65.

¹⁴ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (Indonesia: Guepedia, 2021), hal. 305.

¹⁵ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), hal. 143.

¹⁶ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam, Sebuah Prinsip, Konsep Dan Asas Falsafahnya*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), hal. 114.

2. Definisi Operasional

- a. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan menurut Provinsi Terpilih di Pulau Jawa 2013-2021. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Inflasi diukur melalui Indeks Harga Konsumen menurut Provinsi Terpilih di Pulau Jawa 2013-2021. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Penyaluran dana ZIS adalah pendistribusian dari kegiatan zakat, infaq dan sedekah pada beberapa aspek yang membutuhkan baik aspek konsumtif atau produktif menurut Provinsi Terpilih di Pulau Jawa 2013-2021. Di Indonesia dana ZIS dikelola oleh BAZNAZ.
- d. Pengangguran yang terjadi diukur dari jumlah angkatan kerja dengan jumlah yang mempunyai pekerjaan menurut Provinsi Terpilih di Pulau Jawa 2013-2021. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk mempermudah penyajian dari bab per bab yang masing-masing bab dibagi ke dalam sub bab. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori yang membahas variabel pertama, variabel kedua dan seterusnya, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tentang pendekatan dan jenis pendekatan penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan penulis. Serta di bagian akhir juga terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran penelitian dan daftar riwayat hidup.